

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Capaian standar nasional pendidikan berdasarkan hasil rapor mutu tahun 2020 menunjukkan bahwa satuan pendidikan di Jawa Barat sebanyak 26,12 % sudah memenuhi SNP, dan 73,88 % masih belum memenuhi SNP. Sedangkan berdasarkan hasil akreditasi pada tahun 2019 diperoleh data sebagai berikut: a) Persentase sekolah/madrasah dengan peringkat A hanya tercapai 30,8%; b) Persentase sekolah/madrasah dengan peringkat B tercapai 53,5%; dan c) Persentase sekolah/madrasah dengan peringkat C sebanyak 14,3%.¹

Banyak faktor yang menyebabkan capaian SNP tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Faktor ini dapat berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Diduga pengaruh dari faktor internal yang menjadi penghambat dalam pemenuhan SNP adalah (1) tenaga kependidikan, (2) daya dukung pimpinan, (3) sarana prasarana, (4) ketersediaan dana, dan (5) pemahaman warga sekolah terhadap keterlaksanaan SNP. Sedangkan faktor eksternal yang diduga menjadi penghambat pemenuhan SNP adalah (1) letak geografis sekolah, (2) daya

¹ BAN S/M Provinsi Jawa Barat, Rekomendasi Hasil Akreditasi 27 Kab/kota Tahun 2023. Bandung; 2023

dukung masyarakat, dan (3) kondisi perekonomian masyarakat sekitar.²

Faktor lain yang mempengaruhi capaian SNP di satuan pendidikan adalah mutu belum menjadi prioritas utama di satuan pendidikan sehingga program peningkatan mutu masih belum terukur dan tidak berkelanjutan, hal ini dapat terlihat dari kondisi saat ini pemerintah daerah dan satuan pendidikan masih belum maksimal dalam melakukan perencanaan program pendidikan baik jangka pendek, menengah ataupun jangka Panjang. Berdasarkan data-data di lapangan yang salah satunya diperoleh dari laporan-laporan evaluasi capaian mutu SNP di dinas pendidikan kab/kota di Jawa Barat sejak tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan sebagian besar penyusunan dan penetapan anggaran program dan kegiatan peningkatan mutu belum sepenuhnya berbasis data, sehingga masih bersifat parsial dan tidak berkesinambungan satu sama lain. Hal ini menjadi masalah yang akan berdampak pada aspek yang lainnya, antara lain pelaksanaan program-program di satuan pendidikan menjadi tidak terukur hasilnya, bersifat parsial, tidak berkelanjutan, pada akhirnya mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Permasalahan tersebut terjadi antara lain dikarenakan beberapa faktor yaitu pertama, masih belum tersedianya data yang valid dan akurat yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan perencanaan peningkatan mutu pendidikan, bahkan perangkat

² LPMP Provinsi Jawa Barat, Laporan SPME Tahun 2022; Bandung 2022

yang sudah ada dianggap tidak dapat dipercaya. Kedua, masih belum menyadari pentingnya data sebagai *base line* dalam merencanakan peningkatan mutu pendidikan agar hasilnya terukur dan berkesinambungan. Ketiga, proses pengumpulan data masih banyak terkendala dengan ketidakpahaman dan atau ketidakjujuran para responden dalam memberikan data yang sebenarnya tentang kondisi riil yang terjadi satuan pendidikan sumber data utama mutu pendidikan. Keempat pengumpulan data dilakukan oleh berbagai institusi dan tidak bersifat sistemik, sehingga data yang dihasilkan bersifat parsial, masing-masing melakukan peningkatan mutu tanpa ada koordinasi satu sama lain.

Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu satuan pendidikan belum terlaksana dengan baik karena beberapa hambatan dalam pelaksanaannya³. Pertama, pemangku kepentingan pendidikan belum sepenuhnya mendukung perencanaan penyusunan mutu. Kedua, anggaran belum memadai dalam proses pemetaan mutu dan tindak lanjutnya dalam bentuk program-program peningkatan mutu. Menurut beberapa kepala sekolah, ketika ditemukan permasalahan dalam rapor mutu, satuan pendidikan kesulitan menganggarkan program peningkatan mutu dalam RKS/RKAS karena tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan dana pada BOS. Ketiga, belum semua guru dan orang

³ Rahwati, D. (2019). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar. Indonesian journal of education management and administration review. Vol 3 (1). Hal 13 – 24

tua siswa memiliki kapasitas yang mencukupi untuk evaluasi diri satuan pendidikan. Selain itu, keterbacaan instrumen SPMP pada jenjang SD juga rendah karena ada butir-butir yang tidak dipahami oleh kepala sekolah.

Dalam implementasi sistem penjaminan mutu salah satu hal yang harus dilakukan adalah membangun kesadaran akan arti penting sistem manajemen mutu. Sebagus apapun sistem jika tidak ada tindakan untuk menjalankan sistem tersebut semua akan menjadi sia-sia. Oleh karenanya menciptakan lembaga pendidikan yang bermutu diawali dengan komitmen untuk membuat dan menjalankan sistem manajemen yang rapi, teratur dan terukur.

Fattah berpendapat bahwa banyak faktor yang dibutuhkan untuk mencapai dan memelihara mutu. Kaitan dengan mutu, peran dan fungsi sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) sangat dibutuhkan. Penjaminan mutu merupakan kata lain dari serangkaian kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian (*review*) mutu. Kegiatan penjaminan mutu bertujuan untuk membangun kepercayaan melalui pemenuhan standar minimum pada komponen input, proses, dan output sesuai dengan yang diharapkan oleh pemakai. Terdapat dua bentuk penjaminan mutu, yaitu (1) Desain kegiatan proses perbaikan dan pengembangan mutu berkelanjutan (*continous quality improvement*), (2) Budaya mutu (*quality culture*) yang mengandung tata nilai (*values*). Berdasarkan pendapat tersebut diatas, penjaminan mutu diartikan sebagai suatu sistem yang mengandung tata nilai dan asas dalam

proses perubahan, perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.⁴

Dalam mendukung tercapainya SNP banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Salah satu upaya tersebut telah diterbitkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang kemudian mengalami perubahan dengan Permendikbud No 9 Tahun 2021. Kedua peraturan tersebut pada mendorong sekolah untuk melakukan proses penjaminan mutu pendidikan secara berkesinambungan dalam upaya memenuhi standar nasional pendidikan.

Penerapan sistem penjaminan mutu yang berkesinambungan merupakan salah satu amanat dalam undang-undang sisdiknas, yang saat ini diwujudkan dalam bentuk program Perencanaan berbasis data menjadi salah satu agenda prioritas di kementerian pendidikan kebudayaan, riset dan teknologi yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dan sebagai acuan utama dalam melakukan program peningkatan mutu pendidikan di semua wilayah mulai dari skala makro, meso dan mikro. Tahapan penjaminan mutu ini diawali dengan pemetaan mutu melalui pelaksanaan asesmen nasional di seluruh satuan pendidikan/madrasah, dilengkapi dengan data pendukung yang

⁴ Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, Cet. III, 2017.

diperoleh melalui data pokok pendidikan (DAPODIK) dan *Education Management Information System* EMIS yang akan menjadi sumber data dan menjadi nilai rapor pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

Hasil Asesmen nasional selanjutnya akan ditampilkan dalam bentuk rapor pendidikan yang merupakan gabungan dari berbagai data pendidikan yang tersedia. Rapor Pendidikan merupakan salah satu kebijakan merdeka belajar yang diluncurkan oleh kemendikbudristk pada bulan Maret 2022 yang merupakan kebijakan merdeka belajar episode ke-19. Rapor Pendidikan adalah *platform* yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi.

Selanjutnya Rapor pendidikan ini akan menjadi basis data utama bagi pemerintah pusat, daerah dan juga satuan pendidikan dalam menyusun anggaran dan program peningkatan mutu berdasarkan indikator yang telah ditetapkan mengacu pada 8 SNP yang diekstrak menjadi 5 dimensi mutu yaitu (1) mutu dan relevansi hasil belajar murid, (2) Pemerataan pendidikan yang bermutu, (3) Mutu dan relevansi pembelajaran, (4) kompetensi dan

kinerja GTK, (5) Pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.⁵

Rapor Pendidikan memuat laporan hasil Evaluasi Sistem Pendidikan yang mencakup Rapor Satuan Pendidikan, Rapor Pendidikan Daerah, dan Rapor Pendidikan Nasional. Tujuan dari evaluasi ini adalah melihat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan dalam upaya mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Selain itu, diharapkan dengan adanya Rapor Pendidikan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membuat kebijakan peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata Kelola pendidikan. Inilah posisi Rapor Pendidikan dalam kerangka Evaluasi Sistem Pendidikan).⁶

Besar harapan penulis *platform* rapor pendidikan ini dapat menjadi salah satu solusi dalam memecahkan masalah terkait perencanaan mutu pendidikan melalui kebijakan perencanaan berbasis data (PBD). Impelementasi kebijakan PBD ini dilandasi beberapa landasan yuridis diantaranya UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, PP No 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi sistem pendidikan dasar dan menengah.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

⁶ BSKAP, Evaluasi Pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah (2024); hal 7

Dalam rangka menerapkan berbagai kebijakan di satuan pendidikan, pada tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menetapkan Program Sekolah Penggerak sebagai unit pelaksana yang akan menerapkan berbagai program dan kebijakan diantaranya pemanfaatan rapor pendidikan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan peningkatan mutu sekolah, sehingga penulis berasumsi setiap sekolah penggerak menjadi *role model* bagi sekolah lainnya dalam memanfaatkan rapor pendidikan untuk peningkatan mutu sekolah.

Program Sekolah Penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk mengakselerasi sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun pelajaran. Secara umum, gambaran akhir Program Sekolah Penggerak, akan menciptakan hasil belajar di atas level dari yang diharapkan dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan.⁷

Intervensi yang dilakukan pada sekolah penggerak adalah (a) penguatan SDM di sekolah, (b) pembelajaran dengan paradigma baru, (c) pelatihan dan pendampingan perencanaan berbasis data, serta (d) digitalisasi sekolah. Intervensi tersebut akan memberikan dampak pemahaman dan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru. Salah satu intervensi yang dilaksanakan di sekolah penggerak adalah melaksanakan perencanaan berbasis

⁷ Novayanti, et al. Implementasi Program Sekolah Penggerak dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan. Vol. 3 Special Edition (2023): 151—160

data dengan menggunakan platform rapor pendidikan yang merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu internal.⁸

Pada tahun 2021 telah ditetapkan sebanyak 2462 sekolah penggerak Angkatan 1, selanjutnya pada tahun 2022 ditetapkan sekolah penggerak Angkatan 2 sebanyak 6747 satuan pendidikan, dan di tahun 2023 telah ditetapkan sekolah penggerak Angkatan 3 sebanyak 6000 sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Adapun di provinsi Jawa Barat terdapat 1847 sekolah penggerak, terdiri dari 456 PAUD, 760 SD, 418 SMP, 163 SMA dan 50 SLB.⁹

Berdasarkan pada data di atas, peneliti melakukan studi pendahuluan pada beberapa sekolah penggerak di wilayah Bandung raya yang memiliki nomenklatur sekolah Islam dan telah menerapkan penjaminan mutu internal menggunakan platform rapor pendidikan, maka dipilih SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan KBB , SMA Daarut Tauhid Boarding School Putra KBB, SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir, SMA Al Falah Kota Bandung, dan SMA Daarul Qur`an Kota Bandung

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemetaan mutu pada SPMI berbasis rapor pendidikan di SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan KBB , SMA Daarut Tauhid Boarding School Putra KBB,

⁸ Kemdikbud, Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak; (2020)hal 38-39

⁹ Kemdikbudristek, SK Penetapan Satuan Pendidikan pelaksana program sekolah penggerak Angkatan 1, Jakarta Tahun 2021.

SMA IT Miftahul Khoir SMA Al Falah Kota Bandung, dan SMA Daarul Qur'an Kota Bandung Kota Bandung ?

2. Bagaimana perencanaan mutu pada SPMI berbasis rapor pendidikan di SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan KBB , SMA Daarut Tauhid Boarding School Putra KBB, SMA IT Miftahul Khoir SMA Al Falah Kota Bandung, dan SMA Daarul Qur'an Kota Bandung Kota Bandung ?.
3. Bagaimana pelaksanaan peningkatan mutu pada SPMI berbasis rapor pendidikan berbasis rapor pendidikan di SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan KBB , SMA Daarut Tauhid Boarding School Putra KBB, SMA IT Miftahul Khoir SMA Al Falah Kota Bandung, dan SMA Daarul Qur'an Kota Bandung Kota Bandung ?
4. Bagaimana monitoring dan evaluasi pada SPMI berbasis rapor pendidikan berbasis rapor pendidikan di SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan KBB , SMA Daarut Tauhid Boarding School Putra KBB, SMA IT Miftahul Khoir SMA Al Falah Kota Bandung, dan SMA Daarul Qur'an Kota Bandung Kota Bandung ?
5. Bagaimana Tindaklanjut dan Perbaikan pada SPMI berbasis rapor pendidikan di SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan KBB , SMA Daarut Tauhid Boarding School Putra KBB, SMA IT Miftahul Khoir SMA Al Falah Kota Bandung, dan SMA Daarul Qur'an Kota Bandung Kota Bandung ?

6. Apakah yang menjadi Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam imanajemen SPMI berbasis rapor pendidikan di SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan KBB, SMA Daarut Tauhid Boarding School Putra KBB, SMA IT Miftahul Khoir SMA Al Falah Kota Bandung, dan SMA Daarul Qur'an Kota Bandung Kota Bandung dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal berbasis rapor pendidikan?
7. Bagaimana dampak manajemen SPMI berbasis rapor pendidikan terhadap peningkatan mutu sekolah di SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan KBB, SMA Daarut Tauhid Boarding School Putra KBB, SMA IT Miftahul Khoir SMA Al Falah Kota Bandung, dan SMA Daarul Qur'an Kota Bandung Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang manajemen SPMI Berbasis Rapor Pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Pemetaan mutu pada SPMI berbasis rapor pendidikan di SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan KBB , SMA Daarut Tauhid Boarding School Putra KBB, SMA IT Miftahul Khoir SMA Al Falah Kota Bandung, dan SMA Daarul Qur'an Kota Bandung Kota Bandung.

2. Perencanaan mutu pada SPMI berbasis rapor pendidikan di SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan KBB , SMA Daarut Tauhid Boarding School Putra KBB, SMA IT Miftahul Khoir SMA Al Falah Kota Bandung, dan SMA Daarul Qur'an Kota Bandung Kota Bandung.
3. Pelaksanaan SPMI berbasis rapor pendidikan di SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan KBB , SMA Daarut Tauhid Boarding School Putra KBB, SMA IT Miftahul Khoir SMA Al Falah Kota Bandung, dan SMA Daarul Qur'an Kota Bandung Kota Bandung.
4. Monitoring dan evaluasi pada SPMI berbasis rapor pendidikan di SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan KBB , SMA Daarut Tauhid Boarding School Putra KBB, SMA IT Miftahul Khoir SMA Al Falah Kota Bandung, dan SMA Daarul Qur'an Kota Bandung Kota Bandung.
5. Tindak lanjut dan perbaikan pada SPMI berbasis rapor pendidikan di SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan KBB , SMA Daarut Tauhid Boarding School Putra KBB, SMA IT Miftahul Khoir SMA Al Falah Kota Bandung, dan SMA Daarul Qur'an Kota Bandung Kota Bandung.
6. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam manajemen SPMI berbasis rapor pendidikan di SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan KBB , SMA Daarut Tauhid Boarding School Putra KBB, SMA IT Miftahul Khoir SMA Al Falah Kota Bandung, dan SMA Daarul Qur'an Kota Bandung Kota Bandung.

Bandung dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal berbasis rapor pendidikan.

7. Dampak manajemen SPMI berbasis rapor pendidikan terhadap peningkatan mutu sekolah di SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan KBB, SMA Daarut Tauhid Boarding School Putra KBB, SMA IT Miftahul Khoir SMA Al Falah Kota Bandung, dan SMA Daarul Qur'an Kota Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan teori tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dan implementasinya pada satuan pendidikan dasar dan menengah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Disamping itu juga dapat menjadi rujukan yang bermanfaat untuk perkembangan teori manajemen mutu dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a) satuan Pendidikan, melalui penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran pada pihak sekolah untuk selalu melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan lulusan sekolah/madrasah yang berkualitas sesuai kebutuhan zaman
- b) pendidik dan tenaga kependidikan, melalui penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mengubah mindset para

kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk selalu memberikan layanan mutu pendidikan sesuai tugas dan fungsinya

- c) bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini memberikan input dalam merancang kebijakan pendidikan sekolah/madrasah yang berbasis rapor pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah yang berkelanjutan.

E. Kerangka Berfikir

Salah satu teori yang mendukung kebijakan penjaminan mutu di bidang pendidikan diantaranya disampaikan oleh Sallis (2005:17), pengontrol mutu atau pengawas biasanya melakukan kontrol mutu. Inspeksi dan pengujian adalah metode pengendalian kualitas yang paling umum, dan banyak digunakan dalam pendidikan untuk menentukan apakah standar terpenuhi. Jaminan mutu berbeda dengan kontrol mutu. Selama proses berjalan, jaminan mutu untuk mencegah kesalahan yang terjadi berulang. Jaminan kualitas merancang kualitas ke dalam proses untuk mencoba memastikan bahwa produk tersebut diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.¹⁰

Definisi operasional penjaminan mutu pada penelitian ini mengacu pada Sistem penjaminan mutu internal yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan disebut dengan istilah sistem penjaminan

¹⁰ Edward Sallis, Total Quality Management in Education: Model, Teknik dan Implementainya. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.

mutu internal yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai standar nasional pendidikan. Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

SPMI memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut (Kemdikbud, 2016: 12) : (1) Mandiri, dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan; (2) Terstandar, menggunakan SNP yang ditetapkan pemerintah pusat dan standar yang ditetapkan satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP; (3) Akurat, menggunakan data dan informasi yang akurat serta dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait; (4) Sistematis dan Berkelanjutan, dilaksanakan secara berkelanjutan mengikuti lima langkah penjaminan mutu yang membentuk suatu siklus; (5) Terdokumentasi, seluruh aktivitas dalam pelaksanaan didokumentasikan.¹¹

Pada intinya penjaminan mutu internal merupakan rencana dan tindakan yang sistematis dalam menyediakan kepercayaan terhadap mutu. Pada proses penjaminan mutu dilakukan kegiatan

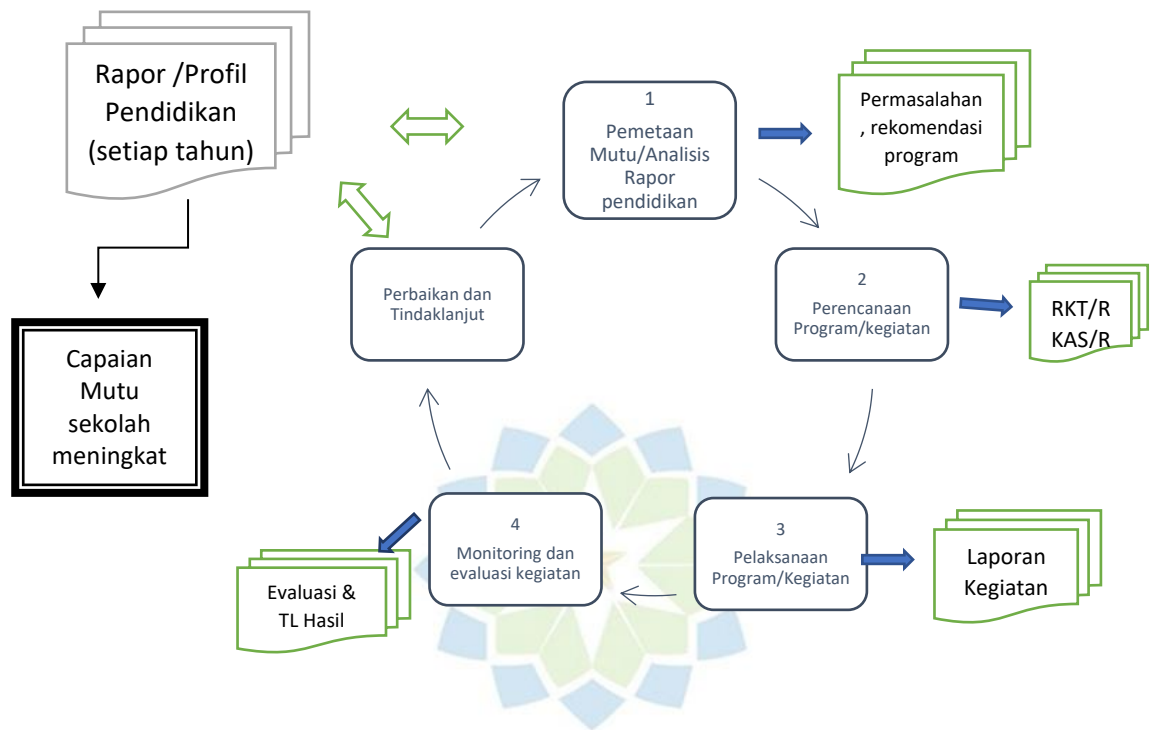
¹¹ Ridwan A. Sani et. Al., Sistem Penjaminan Mutu Internal. (Tangerang: Tira Smart, 2018).

penyempurnaan berupa upaya pemenuhan mutu untuk mencapai SNP atau melakukan peningkatan standar jika SNP telah terpenuhi.

Rapor Pendidikan sebagai sumber data utama yang menjadi acuan sekolah/madrasah dalam melakukan pemetaan mutu, yang selanjutnya dirumuskan program peningkatan mutu sehingga mutu lulusan dapat terwujud sesuai harapan para pengguna, selain itu juga dapat menaikkan capaian mutu yang salah satunya dapat diukur melalui asesmen nasional.

Implementasi penjaminan mutu internal di satuan pendidikan dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun, yang dapat diilustrasikan pada gambar berikut:





Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Penjelasan setiap tahapan pada bagan di atas adalah sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan menelaah rapor pendidikan untuk mengidentifikasi kondisi dan tantangan yang dihadapi dan melakukan refleksi diri untuk menemukan akar permasalahan dari tantangan yang dihadapi
2. Kepala sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah menentukan program dan kegiatan untuk menyelesaikan akar

masalah, menetapkan target capaian, dan memasukkannya di dalam dokumen perencanaan.

3. Kepala sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan
4. Satuan Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi dari program/kegiatan tersebut, untuk mengukur ketercapaian indikator keberhasilan program kemudian hasilnya menjadi masukan bagi perbaikan pada proses berikutnya.

Pada setiap siklus tersebut rincian kegiatan dan tahapan yang dilakukan oleh sekolah adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan mutu melalui analisis profil/rapor pendidikan dan akar masalah
 - a) Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam Profil Pendidikan
 - b) Melakukan refleksi terkait capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan untuk menemukan akar masalah
 - c) Menyusun rekomendasi perbaikan atau peningkatan mutu sebagai dasar dalam merumuskan program /kegiatan secara berkelanjutan
2. Perencanaan program/kegiatan
 - a) Melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan

- b) Menentukan skala prioritas program/kegiatan yang akan dimasukkan dalam RKAS
 - c) Menyusun RKT atau RKAS yang memuat jenis kegiatan, penanggungjawab, jadwal, anggaran dan perangkat pendukung kegiatan
3. Pelaksanaan program/kegiatan
- a) menyusun panduan/pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang tertuang dalam RKT/RKAS
 - b) menentukan indikator keberhasilan kinerja pada setiap program/kegiatan
 - c) melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat
 - d) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- a) Menyusun program dan instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan
 - b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap program/kegiatan untuk memastikan ketercapaian indikator keberhasilan yang telah ditetapkan
 - c) Menyusun laporan monitoring dan evaluasi yang memuat rekomendasi perbaikan sebagai bahan masukan pada kegiatan tahun berikutnya
5. Tindak lanjut dan perbaikan
- a) Melakukan analisis laporan hasil money

- b) Mengidentifikasi temuan yang harus diperbaiki
- c) Membuat rekomendasi tindak lanjut perbaikan atau peningkatan

Tujuan dan hasil dari proses siklus SPMI ini akan menghasilkan capaian mutu yang meningkat. Batasan mutu yang dimaksud pada penelitian ini adalah 6 indikator prioritas yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek sebagai salah satu indikator keberhasilan program sekolah penggerak. Enam indikator tersebut yaitu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, kualitas pembelajaran, iklim keamanan sekolah dan iklim inklusivitas.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkenaan dengan penjaminan mutu sekolah.

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Iwan Irawan pada tahun 2013 yang berjudul Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Menengah Kejuruan (Studi kasus di SMK N 1, SMK N 6, dan SMK N 7 Bandung). Berdasarkan temuan pada penelitian mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal pada ketiga SMK yang menjadi subjek penelitian menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan dalam kinerja mutu sistem penjaminan mutu internal sekolah, hal tersebut ditandai dengan 1) Perencanaan/Desain penjaminan mutu masih berpotensi untuk disusun secara komprehensif mulai dari awal, 2) Monitoring dan evaluasi perlu adanya peningkatan mutu kinerja sistem yang dapat melahirkan

instrumen yang handal sebagai alat ukur dan alat kontrol. temuan tersebut didasari oleh teori sebagaimana disampaikan Walter (1994: 62) bahwa elemen utama dalam penjaminan mutu adalah desain dan kontrol, dengan demikian penelitian ini merekomendasikan Model Hipotetik Sistem Penjaminan Mutu Internal sekolah yang dititikberatkan pada komponen desain dan kontrol dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal sekolah dengan menggunakan SIM berbasis WEB. Komponen penting sistem penjaminan mutu internal sekolah terbagi pada (1) Tahap Desain, yang meliputi pemahaman terhadap kebutuhan penjaminan mutu internal dengan menggunakan pendekatan QFD, pemetaan mutu sebagai dasar dalam proses analisis kebijakan penjaminan mutu, penyusunan standar, dan penyusunan instrumen, (2) Tahap kontrol meliputi, tindakan preventif terhadap mutu desain, tindakan korektif terhadap implementasi, dan tindakan evalautif terhadap hasil, (3) Tahap Implementasi meliputi, komunikasi dan pelatihan terhadap civitas mengenai desain mutu, (4) Tahap evaluasi, sebagai analisis terhadap mutu hasil sebagai feedback terhadap perbaikan mutu selanjutnya. Melalui penelitian ini penulis mendapatkan informasi mengenai komponen penting dalam penjaminan mutu internal di sekolah kejuruan.

2. Penelitian yang relevan dengan penjaminan mutu internal juga dilakukan oleh Rohmad Sodiq pada tahun 2017 dengan

judul penelitian Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang. Lain dengan penelitian yang pertama, penelitian ini menggunakan metode evaluasi. Teknik yang digunakan adalah Goal Free Evaluation Model. Model ini mengevaluasi bagaimana kerja suatu program, sehingga sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian. Sementara data-data diambil dari Kepala Sekolah, pimpinan dari masing-masing unit kerja, dan Tim Renbang (Perencanaan dan Pengembangan) di SMK Negeri 1 Magelang. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu angket (terbuka dan tertutup), dokumentasi, dan wawancara. Program yang dievaluasi meliputi: (1) penetapan standar mutu berdasarkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP); (2) pemetaan mutu dalam bentuk Evaluasi Diri Sekolah (EDS); (3) penyusunan rencana pemenuhan mutu yang diwujudkan dalam bentuk RKJM/RKT; (4) pelaksanaan pemenuhan mutu, dan (5) evaluasi pemenuhan mutu. Hasil dari penelitian ini adalah semua program dalam penjaminan mutu telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga perlu adanya program kearah peningkatan mutu diatas SNP atau peningkatan mutu berkelanjutan. Dari penelitian ini, penulis mendapatkan informasi mengenai tahapan-tahapan dalam proses penjaminan mutu internal di sekolah kejuruan terutama mengetahui bahwa bentuk pemetaan mutu

diwujudkan dalam EDS dan pemenuhan mutu diwujudkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS).

3. Penelitian *R and D* yang dilakukan oleh Woro Widyastuti pada disertasinya yang ditulis pada tahun 2018 dengan judul Pengembangan Model Penjaminan Mutu Internal di SMK Pembangunan Ampel, Model tersebut dikembangkan dalam empat tahapan model yaitu: (1) Tahap Perencanaan Penjaminan Mutu Internal, (2) Tahap Pengorganisasian Penjaminan Mutu Internal, (3) Tahap Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal, dan (4) Tahap Evaluasi Penjaminan Mutu Internal. Hasil validasi kualitas model dari tiga pakar yaitu manajemen mutu, *Research and Development*, dan praktisi pendidikan adalah pada kategori baik. Kebaruan dari model ini adalah model penjaminan mutu internal yang dikembangkan dengan prinsip-prinsip manajemen dari G.R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Model ini dapat digunakan sebagai acuan bagi Kepala Sekolah dan Tim Pengembang Mutu Sekolah dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Koordinasi dan konsistensi dalam implementasi tiap tahap adalah kunci keberhasilan model ini.
4. Disertasi yang ditulis oleh Asep Rosidin pada Tahun 2013 dengan judul Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri di

Kabupaten Bandung, pada penelitian ini fokus pada pembahasan penjaminan mutu internal melalui evaluasi diri sekolah yang disinergikan dengan sistem penjaminan mutu eksternal.

Dari beberapa fokus penelitian di atas, maka ada beberapa aspek penelitian yang selaras namun ada beberapa perbedaan dengan tema penelitian yang disusun oleh penulis, diantaranya konteks penjaminan mutu internal yang memanfaatkan basis data rapor pendidikan, rumusan permasalahan serta lokus penelitian.

